

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berbagai kasus kedangkalan moral dikalangan pelajar mewarnai bangsa ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi sebuah kekhawatiran yang dirasakan berbagai kalangan tak terkecuali yang datang dari dunia pendidikan karena hal ini berimplikasi pada pandangan terhadap dunia pendidikan yang belum mampu membentuk manusia layaknya manusia. Kenyataan manusia tidak hanya berdiri secara intelektualitasnya saja, tetapi perlu membina hal seperti rasa tanggung jawab, nilai jati diri, peka terhadap nilai normatif menyangkut makna nilai dan tata nilai yang disebut ajaran moral.

Derasnya arus globalisasi beberapa tahun terakhir telah merubah tatanan nilai-nilai moral khususnya remaja, pelajar, dan masyarakat pada umumnya. Efek hiburan dalam media cetak maupun elektronik tidak sedikit menjurus pada hal-hal bersifat pornografi yang menyebabkan mereka terpengaruh dengan kehidupan pergaulan bebas dan matrealistis. Mereka selalu menuntut budaya instan, hedonis, dan kepraktisan. Mereka ini hanya merupakan korban dari globalisasi.

Masuknya globalisasi tidak dapat dihindari dan tidak bisa disaring atau diseleksi pada aspek-aspek yang positif semata, apalagi di kalangan generasi muda. Kenyataannya, adanya efek negatif yang signifikan, pada akhirnya generasi muda lupa diri dengan personalitas atau karakter sebagai bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya fenomena dalam kehidupan remaja saat ini. Misalnya, (1) adanya perilaku tidak sopan kepada orang tua dengan mengeluarkan perkataan kasar dan tidak pantas kepada orang tua saat ditegur. (2) adanya perkelahian antar pelajar akibat saling mengejek. (3) Semakin santer atau semaraknya kelompok-kelompok remaja atau anak-anak muda tidak terkecuali

pelajar yang tergabung dalam "geng motor" yang melakukan kekerasan yang mengganggu kenyamanan dan meresahkan masyarakat.

Melihat fenomena-fenomena tersebut, perlu upaya sistematis untuk mencegah dampak negatif dari arus globalisasi yang semakin pesat. Salah satu hal yang perlu dilakukan sedini mungkin adalah menanamkan moral yang sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia. Menanamkan moral pada generasi muda yang paling efektif melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peranan strategis untuk membentengi siswa sebagai generasi penerus bangsa. Karena pendidikan memiliki *basic* perilaku untuk membentuk moral siswa. Berdasarkan sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 Undang-Undang No 22 tahun 2003 menyebutkan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas, dapat dikatakan bahwa pentingnya peranan pendidikan dalam mengembangkan moral siswa sehingga siswa dapat mengklasifikasikan antara perilaku yang baik dan perilaku yang menyimpang.

Perlunya relevansi dalam Pembentukan moral siswa sesuai dengan perkembangan zaman telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara merubah Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 (Kurtilas) yang membuat upaya pembentukan moral siswa di era sekarang menjadi sangat relevan. Karena *soft skills* dan *hard skill* sebagai salah satu pencapaian pembelajaran dalam upaya membangun moral siswa bisa tercapai dengan adanya keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang itu semua menjadi salah satu karakteristik Kurikulum 2013 di semua jenjang pendidikan. Karena kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial

emosional yang menjadi ranah sikap, kemudian kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestesis yang menjadi ranah pengetahuan serta keterampilan dalam rangka meminimalisir dampak negatif adalah tujuan kurikulum 2013 untuk membentuk peserta didik memiliki kecerdasan komprehensif.

Kemendiknas dalam modul pelatihan kurikulum 2013 (2014), bahwa dunia pendidikan memiliki tantangan dalam upaya meningkatkan kecerdasan peserta didik sebagaimana telah disampaikan diatas yaitu:

Kompetensi yang diperlukan di masa depan, meliputi kemampuan berkomunikasi; berpikir jernih dan kritis; mempertimbangkan segi moral dalam suatu masalah; menjadi warga negara yang bertanggung jawab; mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda; hidup dalam masyarakat yang mengglobal; serta memiliki minat luas dalam kehidupan; kesiapan untuk bekerja; kecerdasan sesuai bakat/minatnya; dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dari pernyataan di atas, pengetahuan serta keterampilan bukan satu-satunya hal yang perlu dipersiapkan, melainkan perlu mempersiapkan pula ranah sikap sebagai upaya menghadapi tantangan dari luar dunia pendidikan. Karena itu, pembentukan nilai moral menjadi salah satu target kurikulum 2013 yang mesti diimplementasikan disetiap proses pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn yang memiliki transmisi moral yang signifikan. Hal ini sebagaimana dikemukakan (Winataputra, 2001) bahwa:

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdapat tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. *Pertama*, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang terkait dengan materi utama PPKn antara lain demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani (*civil society*). *Kedua*, kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintah. *Ketiga*, watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia.

Berdasarkan pendapat di atas, fakta bahwa letak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan utama, yaitu dalam hal pengembangan

kompetensi kewarganegaraan dalam konteks pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan (*civic knowledge*); keterampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan (*civic skills*) yang sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara terutama peserta didik; kemudian yang terakhir adalah komitmen, nilai, dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Dengan demikian, dalam upaya membangun *soft skills dan hard skills* melalui keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagaimana konsep dalam kurikulum 2013 bukan menjadi satu hal yang baru pada mata pelajaran PPKn. Karena ketiga aspek tersebut sudah menjadi target sebelum kurikulum 2013 terbentuk. Sehingga mata pelajaran PPKn memiliki transmisi moral yang signifikan.

Dalam kurikulum 2013, implementasi pendidikan nilai moral di sekolah-sekolah tidak diajarkan secara khusus melainkan diintegrasikan dengan seluruh mata pelajaran. Walaupun pembelajaran moral tidak diajarkan secara langsung, tetapi menjadi substansi pembelajaran di sekolah-sekolah di semua jenjang pendidikan. Menurut Kemendiknas (2014), bahwa:

Proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik isi atau konten kompetensi yaitu pengetahuan yang merupakan konten-konten yang bersifat *mastery* dan diajarkan secara langsung (*direct teaching*), keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah konten yang bersifat *developmental* yang dapat dilatih (*trainable*) dan diajarkan secara langsung (*direct teaching*), sedangkan sikap adalah konten *developmental* dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang tidak langsung (*indirect teaching*).

Penjelasan di atas, menggambarkan bahwa sikap yang mencakup moral tidak diajarkan secara khusus tetapi diajarkan secara tidak langsung, dengan kata lain dalam setiap mata pelajaran pendidikan moral diintegrasikan dengan materi-materi pelajaran.

Dalam kurikulum 2013 pencapaian kompetensi lulusan ditingkat satuan pendidikan siswa mesti melalui jenjang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti (KI) merupakan komponen dasar dari proses pembelajaran yang dilaksanakan dikelas. Sebagaimana Mulyasa (2013), bahwa:

Kompetensi inti merupakan operasisasi Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, yang menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skill* dan *soft skills*.

Dalam kurikulum 2013, memuat di antaranya KI-1 dan KI-2 adalah kompetensi yang berhubungan dengan sikap. Kompetensi Inti-1 berhubungan dengan spiritual dan Kompetensi Inti-2 berhubungan dengan sosial (Kemendiknas, 2014). Karena itu, mengembangkan nilai moral pada siswa termuat dalam Kompetensi Inti-1 dan Kompetensi Inti-2. Selanjutnya, selain Kompetensi Inti, pemerintah merumuskan berbagai macam Kompetensi Dasar (KD). Guru setiap mata pelajaran harus menggunakan Kompetensi Dasar untuk mengembangkan kompetensi siswa baik pengetahuan, keterampilan maupun ranah afektif atau sikap dan sekaligus menjadi acuan disetiap pembelajaran yang dilaksanakan.

Pengembangan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam menanamkan moral tidak secara langsung, melainkan diintegrasikan dengan mater-materi pembelajaran dengan mengacu pada KI-1 dan KI-2 serta KD sikap. Karena itu, guru sebagai desainer dan sebagai teladan dalam membentuk moral siswa. Sebagai desainer guru harus mampu merancang proses pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta implementasinya di kelas dalam menanamkan nilai-nilai moral pada siswanya. Selain itu, sebagai teladan tindak-tanduk, perilaku, dan bahkan gaya guru harus menjadi cermin (contoh) oleh siswanya. Kedisiplinan, kejujuran, keadilan, kebersihan, kesopanan, ketulusan, ketekunan, kehati-hatian akan selalu direkam oleh siswa-siswanya dan dalam batas-batas tertentu akan diikutinya. Keteladanan guru sangat penting dalam membentuk moral siswa. Karena keteladanan guru

akan ditiru oleh siswanya. Meniru bukan berarti mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain khususnya guru.

Albert Bandura dalam Laila (2015) menyebutkan bahwa contoh (perilaku model), internal pelajar dan pengaruh dari perilaku model adalah tiga komponen pokok dalam prose pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas.

Artinya, siswa harus menjalani proses belajar melalui pengenalan perilaku dari guru sebagai model, sehingga siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan dan memilih perilaku yang akan dia terapkan dalam kehidupannya.

Dalam konteks pembelajaran moral di kelas, siswa belajar mengubah perilakunya sendiri melalui penyaksian cara orang lain atau guru mereaksi atau merespon sebuah stimulus tertentu. Siswa juga dapat mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain, misalnya guru. Oleh karena itu, keteladanan guru dalam proses belajar sangat penting. Manakala guru berbicara dengan sopan santun dan bahasa yang baik, tingkah laku yang terpuji, siswa akan menirunya. Sebaliknya, apabila contoh-contoh yang diperagakan guru kurang baik, maka siswa juga akan menirunya. Dengan demikian, guru harus menjadi manusia model yang profesional untuk anak didiknya.

Darmadi (2007) bahwa “nilai moral dipandang sebagai pembaharuan atau kelanjutan dari sifat-sifat bawaan yang dimiliki seseorang”. Sifat-sifat bawaan yang dimaksud proses psikologis seperti persepsi, sikap, dan keyakinan pada diri. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa perolehan nilai moral merupakan interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya. Metode ini menekankan pada peran dunia luar sebagai faktor yang memfasilitasi sistem nilai moral

Jadi, pengembangan moral di sekolah-sekolah bergantung pada guru sebagai pelaksana teknis pendidikan lapangan. Praobserasi melalui wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang bimbingan konseling dan wali kelas bahwa

di SMPN 1 Peundeuy terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan moralitas siswa di antaranya:

1. Berkaitan dengan disiplin yaitu: adanya siswa kurang serius dalam mengikuti upacara bendera, adanya siswa datang terlambat, adanya siswa mengerjakan tugas kurang bertanggung jawab dan adanya mengerjakan tugas tidak tepat waktu.
2. Berkaitan dengan mengendalikan diri yaitu siswa laki-laki emosional, berbuat gaduh di kelas, dan selalu tidak sopan berbicara sesama temanya.
3. Berkaitan dengan sopan santun yaitu siswa berpakaian tidak sopan, siswa yang kurang menghormati guru, adanya intimidasi antar siswa dalam kelas, saling ejek dan mengejek orang tua siswa lain.

Pendidikan PPKn memiliki transmisi moral yang lebih nyata dalam proses pembelajarannya. Hal itu terlihat dari salah satu komponen PPKn yaitu karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Informasi yang diperoleh dari guru PPKn bahwa banyak siswa belum menunjukkan karakter yang baik, seperti banyaknya perilaku warganegarayang menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yang sesuai dengan kepribadian bangsa ini. padahal sebetulnya mereka memahami konsep karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Melihat fenomena itu, idealnya, pembelajaran PPKn tidak hanya melakukan transfer pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*), tetapi juga sikap (*attitude*) yang dapat merangsang siswa untuk melakukan perubahan perilaku dan mampu membentuk pandangan dunia siswa, termasuk di dalamnya cara pandang siswa dalam memahami dan menyikapi realitas kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Karena itu, guru harus mampu mendesain proses pembelajaran yang memuat penanaman moral pada siswa yang dituangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan implementasinya di kelas. Selain memiliki kemampuan mendesain dalam menanamkan nilai-nilai moral, guru juga harus menjadi teladan

bagi siswanya. Dengan kata lain, guru PPKn harus memiliki kemampuan mengorganisasikan komponen pembelajaran secara tepat, meliputi tujuan, materi, metode, alat, sumber, guru, siswa, dan evaluasi akan menunjang suasana pembelajaran yang senantiasa mendukung penanaman moral pada siswa.

Berdasarkan kasus yang terjadi di SMPN 1 Peundeuy Garut, peneliti akan mengkaji guru PPKn dalam mengintegrasikan pembelajaran watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dengan penanaman moral pada siswa. Pengkajian akan lebih terfokus pada desain pembelajaran yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan implementasinya di kelas serta keteladanan dalam proses pembelajaran. Dengan mengamati RPP dan implementasinya serta keteladanan guru akan terlihat proses pembelajaran watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dalam menanamkan nilai-nilai moral pada siswa. Untuk keteladanan guru akan dianalisis melalui pendidikan moral menurut Albert Bandura. Karena itu, penelitian ini dengan judul **"Pembelajaran moral Siswa dalam Mengembangkan Kompetensi Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)"** (Studi Kasus pada Siswa SMPN 1 Peundeuy Garut).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, merumuskan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran moral siswa dalam mengembangkan Kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada siswa di SMPN 1 Peundeuy Garut?
2. Bagaimana implementasi pembelajaran moral siswa dalam mengembangkan Kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada siswa di SMPN 1 Peundeuy?
3. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran moral siswa dalam mengembangkan Kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada siswa di SMPN 1 Peundeuy Garut?

4. Apakah faktor yang menjadi hambatan dalam menanamkan nilai moral pada siswa di SMPN 1 Peundeuy Garut?
5. Bagaimana upaya guru PPKn dalam menghadapi hambatan menanamkan nilai moral pada siswa di SMPN 1 Peundeuy Garut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian sebagai berikut ini.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mengkaji internalisasi pembelajaran moral dalam mengembangkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada SMPN 1 Peundeuy.

2. Tujuan khusus

Tujuan umum penelitian ini untuk mengkaji internalisasi pembelajaran moral dalam mengembangkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada siswa SMPN 1 Peundeuy. Selanjutnya dari tujuan umum tersebut, dijabarkan menjadi tujuan khusus sebagai berikut ini.

- a. Menganalisis perencanaan pembelajaran moral dalam mengembangkan Kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada siswa SMPN 1 Peundeuy Garut.
- b. Mengamati implementasi pembelajaran moral dalam mengembangkan Kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada siswa SMPN 1 Peundeuy berdasarkan Bandura.
- c. Menganalisis media yang digunakan pembelajaran moral dalam mengembangkan Kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) di SMPN 1 Peundeuy Garut.
- d. Mendeteksi yang menjadi hambatan dalam menanamkan nilai moral pada siswa di SMPN 1 Peundeuy Garut.

- e. Mengamati upaya guru PPKn dalam menghadapi hambatan menanamkan moral pada siswa di SMPN 1 Peundeuy Garut.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil ini dapat memberikan manfaat kepada semua kepentingan diantaranya sebagai berikut ini.

1. Segi teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan keilmuan mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip menanamkan nilai moral pada siswa berdasarkan kurikulum 2013 serta teori belajar.

2. Segi kebijakan

Membantu pemerintah dalam mencari solusi untuk mengatasi dan menaggulangi degradasi moral siswa atau remaja melalui pembelajaran kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang dikembangkan dalam PPKn.

3. Segi praktik

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selain itu, menambah wawasan mengenai pengintegrasian pembelajaran moral dalam menanamkan kompetensi watak kewarganegaraan (*civic* pada siswa dalam kurikulum 2013 serta mengatasi degradasi moral siswa.

4. Segi isu dan aksi sosial

Melalui penelitian ini mampu membuka mata serta pikiran siswa, pelajar dan juga generasi muda penerus bangsa terhadap bahaya dari dampak degradasi moral remaja.

1.5. Stuktur Organisasi Tesis

Agar jelas, mudah dipahami, dan sistematis, maka perlu menggunakan stuktur organisasi tesis. Stuktur organisasi tesis sebagai berikut ini.:

1. Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian, struktur organisasi tesis.
2. Bab II kajian pustaka yang berisikan tentang kajian teori mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan nilai moral, teori belajar sosial Bandura.
3. Bab III yaitu metodologi penelitian yang berisi mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, subjek dan lokasi penelitian, dan isu etika
4. Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, Pengelolaan dan analisis data penelitian sebagai upaya menghasilkan temuan mengenai tujuan penelitian. Pengelolaan data dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Bagian pembahasan berisi interpretasi temuan dengan mengaitkan dan membandingkan konsep-konsep yang terdapat pada bab II. Pembahasan merupakan refleksi terhadap teori yang dikembangkan oleh peneliti atau peneliti sebelumnya.
5. Bab V yaitu berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan inti dari seluruh hasil penelitian Saran berisi pendapat yang dikemukakan peneliti sebagai bahan pertimbangan dengan harapan memberikan perbaikan yang membangun dan bersifat positif yang ditunjukkan subjek atau lokasi penelitian dan peneliti lanjutan.